

## BIBLIOGRAPHY

### Books

- Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana.
- Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, UII Press.
- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad.
- Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Ismail Hasani, 2010, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Stara.
- Ismail Sunny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, CV Calindra.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-undang*, Jakarta, Konstitusi press.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Kala Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Pataniari Siahaan, 2012 *Politik Hukum Pembentukan Undang – Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Roberto M.Unger, 1976, “*Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*”, The Free Press.

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas – asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet 6, Jakarta, Dian Rakyat.

### **Legal Instrument**

Republic Indonesia, The 1945 Constitution.

Republic Indonesia, Law Number 17 of 2013 on Community Organization.

Republic Indonesia, Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Community Organization.

### **Journals, Papers, Magazine**

Ahmad Syafi'i Mufid, Peta Gerakan Radikalisme Di Indonesia, Makalah Presentasi Workshop Membangun Kesadaran Dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama, Palu, 22 Mei (2012)

Catur Wibowo, Herman Harefa, “Urgency of Community Supervision Organization by Government”, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, (2015)

Debora Sanur L, “Pengesahan Perppu tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik”, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, IV (October, 2017)

Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perpputerkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara”, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 1 (2010)

Imas Sholihah, “Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Anti-Pancasila”, *Jurnal Rechtsvinding*, I, (June,2016)

- M. Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Nomor 2 Volume 18 (2011).
- Nielton Caves Durado, "Peran Organisasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah", *Jurnal Eksekutif* (2006).
- Ni'Matul Huda, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Perppu No. 4 Tahun 2009 dan Perppu No. 4 Tahun 2008)", *Jurnal Konstitusi*, (2010).
- Philippus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*)", *Pro Justitia Tahun XVI*, Nomor 1, (1998).
- Putera Medea, "Kekuasaan Presiden RI dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945", *Lex Administratum*, II (2013).
- Siti Marwiyah, Sudarsono, Isrok, Jazim Hamidi, "Constitutional Authority of the President of Establishing the Government Regulation In lieu of Legislation (Government Regulation in Lieu of Law) State of Emergency", *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol 34 (2015).
- Sudjito, "Chaos Theory of Law: Penjelasan Atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum", *Mimbar Hukum*, Volume XVIII, Nomor 2, (2006).
- Sudjito, "Implementasi Pancasila sebagai *Way of Life*", disampaikan dalam Pelatihan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK, Cisarua, Bogor, March 24-25<sup>th</sup> 2015.
- Sudjito, "Memaknai Perbedaan", Analisis KR, Kedaulatan Rakyat, on August 8<sup>th</sup> 2017.
- Sudjito, "Membaca Kepentingan Politik di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat" dalam Seminar Nasional bertema "QUO VADIS PERPPU ORMAS", Tinjauan Kritis Dari Perspektif Sosio-Politik, Hukum dan HAM, Oktober 19<sup>th</sup> 2017.
- Suwoto Mulyosudarmi, "Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)" (Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya (1990)

## Internet

Aan, Syaf, “Sosiolog UNS: Sejak Awal Perppu Ormas Bawa Muatan Konflik Sosial”, accessed from <http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2017/07/24/52189/sosiolog-uns-sejak-awal-perppu-ormas-bawa-muatan-konflik-sosial/#sthash.PXbe2HFP.dpbs> on Wednesday, 8<sup>th</sup> November 2017 at 5:33 a.m.

Fabian Januarius Kuwado, Ini tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas, accessed from <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas> on Thursday, 16<sup>th</sup> March 2018 at 2:59 a.m.

Hari Budiyanto, Organisasi Sosial, Seminar FKIP UMS Surakarta, accessed from <http://www.scribd.com/doc/9406552/Organisasi-Sosial-Masyarakat> on Monday, 23<sup>rd</sup> October 2017 at 6:18 a.m.

Humas, Inilah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, accessed from <http://setkab.go.id/inilah-governmentregulationinlieuoflaw-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/> on Friday, 17<sup>th</sup> November 2017 at 5:14 a.m.

Kementerian Dalam Negeri, “Ini Landasan Sosiologis Dikeluarkannya Perppu Ormas”, accessed from <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/10/17/ini-landasan-sosiologis-dikeluarkannya-perppu-ormas> on Wednesday, 8<sup>th</sup> November 2017 at 4.54 a.m.

Kominfo, Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas, accessed from [https://kominfo.go.id/index.php/content/dei/10094/pemerintah-keluarkan-governmentregulationinlieuoflaw-no22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/dei/10094/pemerintah-keluarkan-governmentregulationinlieuoflaw-no22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr) on Friday, 17<sup>th</sup> November 2017 at 5:06 a.m.

Kristian Erdianto, “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia”, accessed from <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia> on 18<sup>th</sup> February 2107 at 2:18 p.m.

Roberto Belamirrus, Kerusuhan di YLBH Bentrokan Pecah hingga RSCM dan Stasiun Cikini, accessed from <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/02065111/kerusuhan-di-ylbhi-bentrokan-pecah-hingga-rscm-dan-stasiun-cikini>, on Thursday, 11<sup>th</sup> November 2017 at 3:30 a.m.

